

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan kenaikan harga secara umum. Kecenderungan yang dimaksud disini adalah bahwa kenaikan tersebut bukan terjadi sesaat. Misalnya harga barang-barang menjelang lebaran, natal, dan tahun baru atau hari libur lainnya cenderung naik. Namun setelah perayaan usai, masyarakat kembali hidup seperti semula, harga akan kembali ke kondisi semula. Maka kenaikan harga seperti itu tidak dianggap inflasi. (Bramantyo Djohanputro, 2008:147)

Pertumbuhan dan kestabilan perekonomian dapat dikatakan merupakan permasalahan dibanyak negara dunia, termasuk Indonesia. Ada banyak usaha melalui berbagai kebijakan telah diterapkan demi meningkatkan atau setidaknya mempertahankan kestabilan perekonomian yang diharapkan akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Salah satu usaha tersebut adalah melalui pengendalian laju inflasi. Jika angka inflasi berada pada tingkat yang tepat akan mampu merangsang perekonomian untuk bertumbuh kearah yang positif, sesuai dengan target yang diharapkan.

Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai

asset dan kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Oleh karena itu, masyarakat, pelaku bisnis, kalangan perbankan dan pemerintah sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi.

Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi sehingga dapat menimbulkan ekspektasi keliru dan manipulasi yang dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Indonesia sebagai negara yang berkembang dimana kehidupan ekonominya bergantung pada tata moneter dan perekonomian dunia selalu menghadapi masalah-masalah tersebut. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapatkan perhatian para pemikir ekonomi. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat atau mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Gejolak perekonomian yang terjadi salah satunya karena adanya faktor inflasi. Tingkat inflasi merupakan variabel ekonomi makro paling penting dan paling ditakuti para pelaku ekonomi

termasuk pemerintah. Hal ini dapat membawa pengaruh buruk pada struktur biaya produksi dan tingkat kesejahteraan.

Di Indonesia ada banyak provinsi yang mengalami inflasi yang begitu tinggi salah satunya yaitu kepulauan Bangka Belitung. Dimana hampir 90% kebutuhan bahan makanan dipenuhi oleh Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Selatan yang menyebabkan Bangka Belitung mengalami inflasi yang begitu tinggi. Berdasarkan pengamatan, inflasi bangka belitung pada tahun 2017 paling rendah dihitung dari 4 tahun terakhir. Komoditas penyumbang inflasi adanya kenaikan tarif angkutan udara sejalan dengan meningkatnya permintaan tiket pesawat di akhir tahun, kenaikan harga ikan dan harga beras.

Tabel.I.1 Tingkat Inflasi Bangka Belitung Tahun (2014-2017)

No	Tahun	Inflasi
1	2014	9,06
2	2015	3,27
3	2016	6,75
4	2017	3,13

Sumber: BPS Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Diolah,2018

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan inflasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertumbuhan inflasi tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 9,06% dan mengalami penurunan pada tahun selanjutnya yaitu 3,27% yang disebabkan berkurangnya daya beli masyarakat akibat penurunan harga komoditas andalan daerah seperti timah, sawit dan karet yang disebabkan perlambatan ekonomi dunia. Di sisi lain inflasi Bangka Belitung relatif dapat terkendali karena suplai pasokan bahan pangan dapat memenuhi permintaan.

Koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan di provinsi Bangka Belitung selama tahun 2015 juga memberikan kontribusi kepada pengendalian harga di Bangka Belitung. (Jelas Bayu Murtanto, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam (<http://bangka.tribunnews.com>))

Pada tahun 2016 inflasi Bangka Belitung mengalami kenaikan menjadi 6,75% tingginya angka inflasi di Kepulauan Bangka Belitung yang nyaris dua kali lipat dari angka inflasi nasional. Angka inflasi yang cukup tinggi cenderung bersifat permanen disebabkan distribusi pasokan bahan kebutuhan pokok belum begitu lancar dan kerap terkendala cuaca buruk, (papar Bayu Murtanto, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pertemuan tahunan bersama pemerintah daerah *stakeholder* (www.ekonomi.kompas.com))

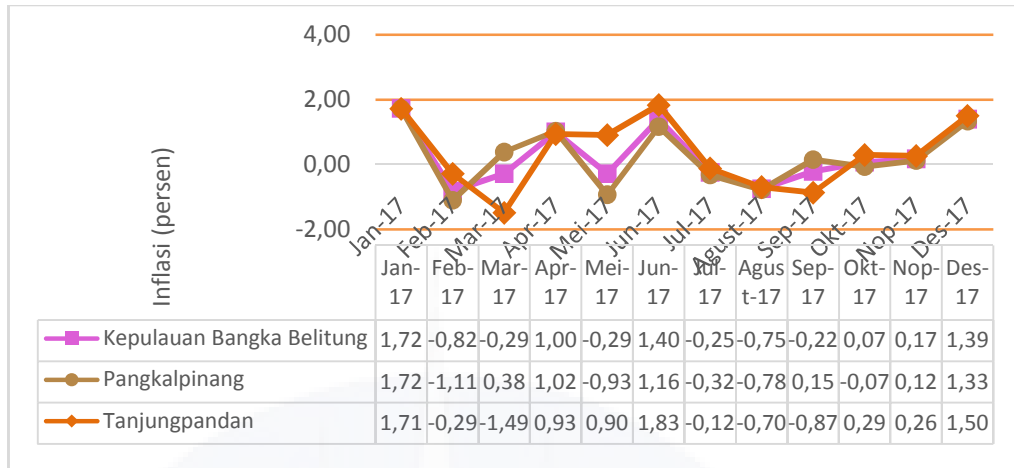
Di tahun 2017 inflasi Bangka Belitung paling rendah dihitung 4 tahun terakhir yaitu sebesar 3,13%, berada dibawah realisasi inflasi nasional 3,61% dan sesuai dengan sasaran inflasi nasional sebesar $4 \pm 1\%$ yang disebabkan oleh meningkatnya kinerja ekonomi Babel. Utamanya karena ditopang oleh meningkatnya kinerja ekspor sejalan dengan membaiknya harga komoditas unggulan seperti timah, CPO dan karet. Selain itu secara sektoral pertumbuhan ekonomi Babel ditopang oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pertambangan dan lapangan usaha perdagangan.

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan mengganggu stabilitas perekonomian, menyulitkan perencanaan bagi dunia usaha, menurunkan minat investasi masyarakat, menghambat rencana pembangunan pemerintah dan berpengaruh pada struktur APBD yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Inflasi yang cukup tinggi dan terus-menerus akan mengacaukan APBD, karena biaya anggaran rutin maupun anggaran pembangunan kemungkinan akan membengkak sehingga tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Bahkan laju inflasi yang berfluktuasi atau tidak menentu dapat mengakibatkan defisit anggaran pemerintah.

Selama 2017, kepulauan Bangka Belitung sebagai agregat dari kota pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai kota pantauan inflasi di provinsi. Yang menunjukkan arah laju inflasi yang sama kecuali di empat bulan yaitu Maret, Mei, September, dan Oktober.

Grafik.I.1 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, dan Kota Tanjungpandan, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Jika dilihat dari laju inflasi maupun deflasi tertinggi antara dua kota pantauan inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sepanjang Januari hingga Desember 2017, Pangkalpinang mengalami inflasi tertinggi pada Januari 2017 sebesar 1,72 persen dan Tanjungpandan pada Juni 2017 sebesar 1,83 persen. Deflasi tertinggi sepanjang 2017 di Tanjungpandan terjadi di bulan Maret sebesar 1,49 persen diikuti bulan September sebesar 0,87 persen. Sementara di Pangkalpinang deflasi tertinggi sebesar 1,11 persen pada Februari 2017 diikuti Mei 2017 sebesar 0,93 persen.

Komoditi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi di Kota Pangkalpinang selama 2017 diantaranya tarif listrik sebesar 1,22 persen; bensin sebesar 0,19 persen; ikan tenggiri sebesar 0,18 persen; ikan kembung sebesar 0,14; ikan hapau sebesar 0,14 persen; dan cumi-cumi sebesar 0,13 persen. Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel.I.2 Dua Puluh Barang dan Jasa dengan Andil Inflasi Terbesar di Kota Pangkalpinang, 2017.

No	Kode	Jenis Barang dan Jasa	Andil Inflasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	302021	Tarif Listrik	1,22
2.	701008	Bensin	0,19
3.	103077	Ikan Tenggiri	0,18
4.	103037	Ikan Kembung	0,14
5.	103086	Ikan Hapau	0,14
6.	103020	Cumi-Cumi	0,13
7.	702012	Tarif Pulsa Ponsel	0,13
8.	203011	Rokok Kretek Filter	0,11
9.	201038	Nasi Dengan Lauk	0,09
10.	101001	Beras	0,09
11.	103098	Ikan Kerisi	0,09
12.	103126	Ikan Bulat	0,07
13.	107010	Tahu Mentah	0,07
14.	103093	Sotong	0,06
15.	103081	Ikan Tongkol	0,06
16.	108010	Jeruk	0,06
17.	601002	Tarif Sekolah Dasar	0,05
18.	601004	Tarif Sekolah Menengah Atas	0,05
19.	203012	Rokok Putih	0,04
20.	703039	Biaya Perpanjangan STNK	0,04

Sumber: BPS provinsi kepulauan Bangka Belitung, 2017

Inflasi/deflasi sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi dan ketersediaan berbagai kebutuhan rumah tangga yang tentu saja berimbas langsung terhadap tingkat harga, serta kebijakan pemerintah akan sektor strategis, seperti bahan bakar minyak, tarif listrik, dan bahan bakar rumahtangga. Tingkat permintaan dari konsumen yang dipengaruhi faktor musiman seperti

perayaan hari keagamaan serta kondisi cuaca memberikan dampak yang cukup signifikan pula.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota. Berikut data Indeks Harga Konsumen (IHK) kota PangkalPinang tahun 2015-2017.

Tabel I.III Indeks Harga Konsumen secara Umum kota PangkalPinang tahun 2015-2017

Bulan	Tahun		
	2015	2016	2017
Januari	119,53	124,92	136,69
Februari	118,32	125,41	134,19
Maret	117,77	125,74	134,70
April	118,79	124,55	136,08
Mei	118,06	124,41	134,81
Juni	117,90	127,07	136,38
Juli	121,65	128,54	135,94
Agustus	122,35	129,73	134,88
September	123,38	130,56	135,08
Oktober	123,12	130,12	134,99
November	121,87	130,85	135,15
Desember	123,77	133,40	136,95

Sumber: BPS provinsi kepulauan Bangka Belitung, 2018

Perubahan data IHK merupakan indikator ekonomi makro yang penting untuk memberikan gambaran tentang laju inflasi suatu daerah dan lebih jauh lagi dapat menggambarkan pola konsumsi masyarakat. Selain sebagai salah satu indikator ekonomi makro dan indikator untuk menentukan kebijaksanaan di

bidang ekonomi serta berguna untuk mendeteksi kondisi perekonomian, laju inflasi juga menunjukkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa. Selain itu IHK juga digunakan untuk menghitung andil inflasi.

Inflasi yang diukur dengan indeks harga konsumen (IHK) di kota Pangkal Pinang dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran dan terbagi menjadi 36 sub-sub kelompok pengeluaran.

Tabel.I.IV kelompok dan Sub kelompok Pengeluaran

No	Kelompok pengeluaran	Sub Pelompok Pengeluaran
1	Kelompok pengeluaran bahan makanan	Sub kelompok padi-padian, ubi-ubian dan hasilnya
		Sub kelompok daging dan hasilnya
		Sub kelompok ikan segar
		Sub kelompok ikan diawetkan
		Sub kelompok telur, susu dan hasilnya
		Sub kelompok sayur-sayuran
		Sub kelompok kacang-kacangan
		Sub kelompok buah-buahan
2	Kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	Sub kelompok lemak dan minyak
		Sub kelompok bahan makanan lainnya
		Sub kelompok makanan jadi
		Sub kelompok minuman tak beralkohol
3	Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	Sub kelompok tembakau, rokok dan minuman beralkohol
		Sub kelompok biaya tempat tinggal
		Sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air
		Sub kelompok perlengkapan rumah tangga

			Sub kelompok penyelenggaraan rumah tangga
			Sub kelompok sandang laki-laki
4	Kelompok sandang	pengeluaran	Sub kelompok sandang wanita
			Sub kelompok anak-anak
			Sub kelompok barang pribadi dan sandang lainnya
5	Kelompok kesehatan	pengeluaran	Sub kelompok jasa kesehatan
			Sub kelompok obat-obatan
			Sub kelompok jasa perawatan jasmani
			Sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika
			Sub kelompok jasa pendidikan
6	Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga	pengeluaran	Sub kelompok kursus-kursus dan pelatihan
			Sub kelompok perlengkapan atau peralatan pendidikan
			Sub kelompok rekreasi
			Sub kelompok olahraga
7	Kelompok transportasi dan komunikasi	pengeluaran	Sub kelompok transpor
			Sub kelompok komunikasi dan pengiriman
			Sub kelompok sarana dan penunjang transpor
			Sub kelompok jasa keuangan
			Sub kelompok sarana dan penunjang lainnya

Sumber : data diolah peneliti, 2018

Untuk mengetahui, meringkas dan mereduksi sub kelompok pengeluaran (variabel yang akan diteliti) yang memberikan kontribusi besar terhadap laju inflasi, digunakanlah metode analisis faktor. Analisis faktor merupakan nama umum yang menunjukkan suatu kelas prosedur, utamanya dipergunakan untuk mereduksi data atau meringkas, dari variabel yg banyak diubah menjadi lebih sedikit variabel. Misalnya dari 15 variabel sebelumnya diubah menjadi 8 variabel

yang baru. Kebanyakan dari variabel-variabel tersebut berkorelasi sesamanya dan harus diperkecil jumlahnya agar mudah dikelola (*manageable*).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang: “Analisis Faktor Indeks Harga Konsumen (IHK) Yang Mempengaruhi Laju Inflasi dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kota PangkalPinang 2015-2017”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Variabel-variabel Indeks Harga Konsumen pada sub-sub kelompok pengeluaran apa sajakah yang layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut?
2. Variabel-variabel indeks harga konsumen pada sub kelompok pengeluaran apa sajakah yang layak untuk dihilangkan (direduksi)?
3. Variabel-variabel indeks harga konsumen pada sub kelompok pengeluaran apa sajakah yang paling dominan mempengaruhi inflasi?
4. Bagaimana dampak inflasi terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota PangkalPinang?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya untuk mengidentifikasi variabel indeks harga konsumen pada sub kelompok pengeluaran yang layak untuk dihilangkan dan untuk mengelompokkan, meringkas variabel indeks harga konsumen pada sub kelompok pengeluaran menjadi variabel baru yang paling dominan mempengaruhi laju inflasi. Data penelitian yang digunakan adalah data

indeks harga konsumen (IHK) dan inflasi data diperoleh langsung dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi variabel Indeks Harga Konsumen pada sub-sub kelompok pengeluaran apa sajakah yang layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut.
2. Untuk mengidentifikasi variabel indeks harga konsumen pada sub kelompok pengeluaran yang layak untuk dihilangkan (direduksi).
3. Untuk mengelompokkan, meringkas variabel indeks harga konsumen pada sub kelompok pengeluaran menjadi variabel baru yang paling dominan mempengaruhi laju inflasi.
4. Untuk menggambarkan atau mengetahui dampak inflasi terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota PangkalPinang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang Manajemen Keuangan khususnya mengenai indeks harga konsumen pada sub kelompok pengeluaran yang mempengaruhi laju inflasi dan implementasinya

terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota PangkalPinang . Dan dapat digunakan sebagai dasar perluasan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti yang empiris mengenai informasi tentang indeks harga konsumen pada sub kelompok pengeluaran yang mempengaruhi laju inflasi dan implementasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota PangkalPinang. Serta menjadi bahan evaluasi serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Manfaat akademis

Sebagai bahan referensi atau bahan masukan untuk penelitian lanjutan dengan metode yang lebih ilmiah yang lebih mendalam dalam memecahkan masalah-masalah lain yang berkaitan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini, berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistimatika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II ini merupakan tinjauan teoritis yang berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu

yang relevan dengan penelitian, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini menguraikan metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini, dilakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh untuk menjawab masalah-masalah yang sedang diteliti dan keterbatasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab V terakhir ini, berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran yang perlu disampaikan untuk subyek penulis.